

ANALISIS KEBUTUHAN INVETASI DI WILAYAH RIAU PESISIR

Taryono dan Ufira Isbah

Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This study aims to (i) determine the structure and source of investment in Riau Coastal region, (ii) determine the relationship between investment income Riau Coastal region (iii) determine and analyze the level of investment required for the development of the region Riau Coastal fore. This type of research is the development of research that aims to develop, expand, and dig deeper into the theory of investment and economic development in a region that is strongly associated with the field of development economics and regional economics

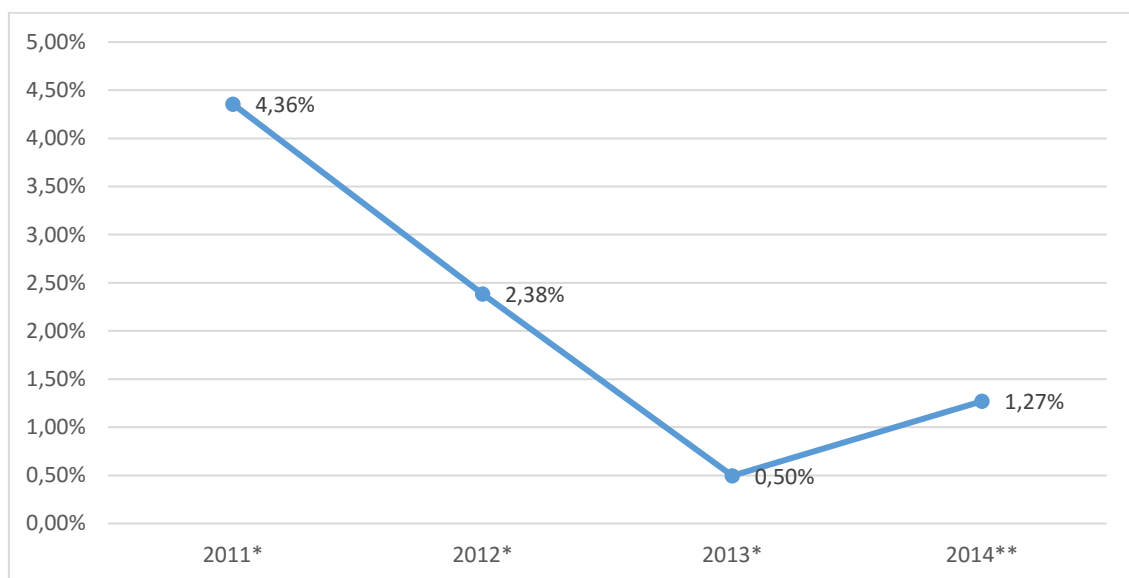
The results showed that the structure of investment in Riau Coastal regions according to economic sector based on the prices prevailing during the period 2011-2014 the main source of the field is still dominated by mining and quarrying. Although the views of the structure of the mining and quarrying sector investment is an economic sector with the greatest investment value but growth began to slow. Capital Output Ratio (COR) during the period 2010-2014 on the basis of prices prevailing in the region of Riau Pesisir average of 0.136 with the highest COR Dumai at 0.345 and lowest Rokan Hilir at 0.080. Meanwhile, based on constant prices of 2010 the average number COR in Riau Coastal region of 0.158 with the highest COR figure of 0.335 Kota Dumai and Rokan Hilir lows of 0.097. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) in Riau Coastal region on the basis of prices prevailing during the period 2010-2014 amounted to 1,289 with the highest ICOR Dumai at 5.640 and lowest Rokan Hilir at 0.663. Meanwhile, based on constant prices ICOR in Riau Coastal region of 9.532. Needs total investments over the period 2016-2020 in Riau Coastal region at constant prices in 2010 amounted to Rp. 257,431.24 billion, or based on the current price of Rp. 277,540.47 billion..

Keywords : Investments, the region of Riau Pesisir

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan suatu wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut dari aspek ekonomi adalah dengan terus meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan serta menurunkan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus terkoreksi. Pada tahun

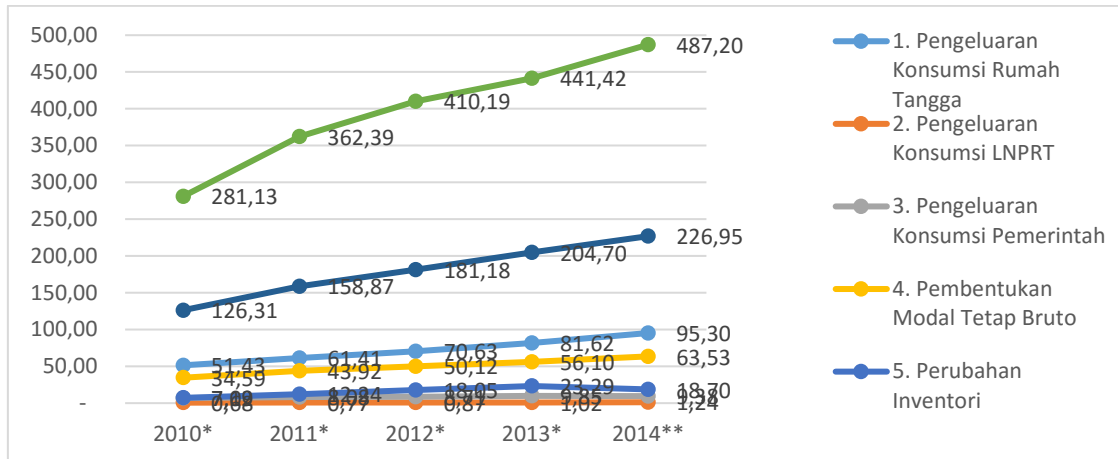
2011 tumbuh sebesar 4,36% dan terkoreksi menjadi sebesar 2,38% pada tahun 2012. Di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir terkoreksi lebih dasyat lagi menjadi sebesar 0,5% walaupun ditahun 2014 mulai menunjukkan peningkatan menjadi tumbuh sebesar 1,27%. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun akan berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi masyarakat.



Gambar 1 : Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Riau Pesisir Tahun 2011-2014 (Sumber : BPS Provinsi Riau, 2015)

Dilihat dari sisi agregat expenditure, kontribusi terbesar terhadap pembentuk pendapatan wilayah Riau Pesisir bersumber dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2010 ekspor wilayah Riau Pesisir sebesar Rp. 281,13 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 487,20 triliun atau rata-rata setiap tahun ekspor tumbuh sebesar 14,74%.

Pertumbuhan impor rata-rata setiap tahun sebesar 15,78% masih lebih tinggi dari ekspor. Sehingga nilai impor meningkat dari Rp. 126,31 triliun di tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 226,95 triliun. Selain, ekspor dan impor pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir juga didorong dari sisi konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, LNPR, maupun pemerintah.



Gambar 2 : Agregat Expenditure (AE) Wilayah Riau Pesisir Tahun 2011-2014 (Sumber : BPS Provinsi Riau, 2015)

Pemenuhan kebutuhan konsumsi di Wilayah Riau Pesisir terhadap barang dan jasa, bukan hanya dari barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan investasi di Wilayah Riau Pesisir sendiri tapi juga disediakan dengan cara mengimpor barang dan jasa dari wilayah/negara lain. Peranan impor dalam perekonomian wilayah Riau Pesisir meningkat dari 24,85% pada tahun 2010 menjadi 25,15% pada tahun 2014. Peranan investasi dalam mendorong peningkatan produksi barang dan jasa di wilayah Riau pesisir masih relative terbatas. Pada tahun 2010 peranan investasi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6,80% dan meningkat menjadi 7,04% di tahun 2014. Padahal multiplier investasi cenderung lebih besar dibandingkan dengan multiplier konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dibutuhkan upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir yang saat ini cenderung menurun. Pemupukan investasi yang mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir dari waktu ke waktu perlu direncanakan. Kebutuhan dana investasi dapat bersumber dari

swasta/masyarakat maupun pemerintah. Bentuk investasi swasta seperti PMDN dan PMA, sedangkan investasi pemerintah seperti investasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurunnya produksi dan harga minyak dunia sampai pada harga \$30/barel menyebabkan penerimaan pemerintah daerah di wilayah Riau Pesisir dari minyak bumi turun. Akibatnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sulit menjadi terganggu.

Investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Riau Pesisir atas dasar harga berlaku selama periode 2010-2014 rata-rata setiap tahun sebesar 15,42% dan pada periode yang sama rata-rata investasi tumbuh sebesar 16,42%. Pertumbuhan investasi di wilayah Riau Pesisir yang terus terkoreksi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga ikut terkoreksi. Pada tahun 2011 investasi tumbuh sebesar 26,99% dan ekonomi tumbuh sebesar 27,41%. Tahun 2014 pertumbuhan investasi terkoreksi menjadi sebesar

13,25% dan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir juga ikut terkoreksi menjadi sebesar 10,31%. Perubahan peran investasi yang diikuti laju pertumbuhan investasi yang terus menurun menyebabkan kontribusi investasi terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir juga ikut terkoreksi. Kontribusi pembentukan modal tetap bruto (investasi) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Riau Pesisir turun dari 1,84% ditahun 2011 menjadi 0,91% ditahun 2014.

Sumber utama untuk investasi merupakan tabungan masyarakat. Tingkat kecenderungan menabung (MPS) yang terus meningkat merupakan modal utama dalam meningkatkan jumlah tabungan. Kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat, keduanya memiliki korelasi yang positif. Penelitian Taryono dan Ekwarso (2012) menunjukkan hasil perhitungan indeks gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat pada beberapa daerah di wilayah Riau Pesisir ketimpangannya dalam kategori sedang. Ketimpangan yang sedang tersebut diharapkan mampu meningkatkan kecenderungan menabung sebagai sumber peningkatan investasi.

Daerah pada wilayah Riau Pesisir pada umumnya merupakan daerah penghasil migas. Penerimaan pemerintah daerah yang relative besar dari minyak bumi telah menjadikan kapasitas fiskal daerah-daerah di wilayah Riau Pesisir semakin besar. Sehingga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan (investasi) dalam penyediaan barang public turut meningkat. Penelitian Taryono dan Ekwarso (2012) menemukan bahwa rata-rata belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dan

bukan penghasil migas terdapat perbedaan yang signifikan. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Besarnya belanja langsung pada wilayah Riau Pesisir diharapkan berkorelasi positif dengan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung berkembangnya kegiatan investasi. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama, mengingat saat ini penerimaan dari migas mulai mengalami penurunan seiring penurunan produksi dan harga minyak dunia. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya, penyediaan barang public yang tidak sebanding dengan kapasitas perekonomian dapat menghambat tumbuhnya kegiatan investasi di wilayah Riau Pesisir. Kondisi infrastruktur jalan merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Taryono dan Ekwarso (2013) menyebutkan bahwa kondisi jalan di Provinsi Riau sebesar 11,77% dalam kondisi yang tidak mantap, dimana dari kondisi tersebut sebesar 62,39% dalam kondisi rusak ringan dan sisanya sebesar 37,61% rusak berat.

Perencanaan investasi suatu wilayah menjadi penting untuk dilakukan guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Penduduk wilayah Riau Pesisir yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan wilayah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan penduduk maka dapat menimbulkan permasalahan penurunan kesejahteraan dan pengangguran meningkat. Salah satu upaya yang terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

wilayah adalah dengan terus meningkatkan kegiatan investasi. Tersedianya informasi kebutuhan investasi suatu wilayah akan membantu mempermudah pengalokasian sumberdaya ekonomi menjadi lebih efisien dan efektif. Karena akan mengarahkan seluruh stakeholders pada arah dan persepsi yang sama tentang pengembangan investasi wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kebutuhan investasi di wilayah Riau Pesisir.

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan investasi dan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan wilayah Riau Pesisir kedepan. Sesuai dengan maksud penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur dan sumber investasi, hubungan antara investasi dengan pendapatan wilayah, dan besarnya kebutuhan investasi diwilayah Riau Pesisir.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian meliputi seluruh wilayah Riau Pesisir. Pemahaman wilayah Riau Pesisir dalam penelitian ini adalah daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan wilayah laut. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang termasuk kedalam kategori wilayah Riau Pesisir terdiri dari 7 (tujuh) daerah yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian Analisis Kebutuhan Investasi di Wilayah Pesisir sebagai data utamanya merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh instansi/

lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Jenis data yang banyak dibutuhkan untuk analisis ini adalah data makro, seperti dapat Produk Domestik Regional Bruto, dokumen rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sangat terkait dengan bidang ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi regional. Secara teoritis hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat, (1939) dan Sir Roy Harrod, seorang ekonom Inggris, (1947), mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Koefisien itu mengaitkan penambahan kapasitas terpasang (capital) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Besarnya investasi yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun tertentu dapat tercermin dari nilai Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). Namun demikian data tersebut hanya disajikan dalam bentuk agregat, sedangkan besaran PMTB menurut sektor ekonomi tidak tersajikan. Oleh karena itu, dalam menganalisis struktur investasi di wilayah Riau Pesisir perlu terlebih dahulu dihitung besarnya investasi setiap sektor ekonomi dengan formulasi sebagai berikut :

$$PMTB_{sektor\ i} = \left\{ \left[\frac{PMTB_{Total}}{\Delta Y} \right] \times g \times \Delta Y_i \right\} / g_i$$

Dimana,

PMTB sektor i = Besarnya investasi pada sektor i

PMTB total = Nilai investasi total suatu wilayah

ΔY = Pertambahan Produk Domestik Regional Bruto

ΔY_i = Pertambahan Produk Domestik Regional Bruto Sektor i

g = Pertumbuhan ekonomi

g_i = Pertumbuhan ekonomi sektor i

Koefisien yang menggambarkan hubungan antara investasi dengan pertambahan ekonomi ini biasa disebut *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Selanjutnya untuk menganalisis hubungan antara investasi dengan pendapatan di wilayah Riau Pesisir digunakan formulasi perhitungan ICOR. Berdasarkan teori formulasi ICOR adalah sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Dimana,

ΔK = Penambahan barang modal

baru/kapasitas terpasang

ΔY = Pertambahan output

Namun demikian, pertambahan output pada tahun tertentu tidaklah hanya disebabkan oleh penambahan barang modal baru melainkan juga adanya akumulasi capital yang terjadi. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh

swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

Dimana,

I = Investasi

ΔY = Pertambahan output

Agar memperoleh satu nilai ICOR yang dapat mewakili suatu periode waktu, maka digunakan penghitungan dengan rata-rata sederhana. Nilai koefisien ICOR dapat positif atau negative. Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain, investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga relatif kurang efisien. Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada masa datang, maka perlu dilakukan perencanaan besarnya kebutuhan investasinya. Formulasi yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi apabila angka ICOR maupun COR telah diketahui adalah sebagai berikut :

$$I_{tn} = ICOR \times \Delta Y_n \text{ atau } I_{tn} = COR \times Y_n$$

Dimana,

I_{tn} = Kebutuhan Investasi tahun n

ΔY_n = Pertambahan output tahun n

ICOR = Incremental Capital Output Ratio

COR = Capital Output Ratio

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Sumber Investasi di Wilayah Riau Pesisir

Nilai investasi di wilayah Riau Pesisir selama periode 2010-2014 yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 nilai PMTDB wilayah Riau Pesisir sebesar Rp. 34.585,40 milyar meningkat menjadi Rp. 63.529,27 milyar atau rata-rata setiap tahunnya tumbuh sebesar 16,42%. Rata-rata pertumbuhan PMTDB selama periode 2010-2014 tertinggi berada pada Kabupaten

Indragiri Hilir sebesar 17,37% yang diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebesar 17,06%. Sehingga PMTDB Kabupaten Indragiri Hilir meningkat dari Rp. 5.663,63 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 10.748,86 milyar pada tahun 2014 dan PMTDB Kabupaten Bengkalis meningkat dari Rp. 8.367,82 milyar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 15.713,86 milyar pada tahun 2014. Sedangkan pertumbuhannya terendah adalah Kota Dumai sebesar 9,02%. Sehingga nilai PMTDB Kota Dumai meningkat dari Rp. 5.513,59 milyar pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 7.788,23 milyar pada tahun 2014.

Tabel 1 : Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Riau Pesisir Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
Indragiri Hilir	5.663.628,70	7.303.302,98	8.330.268,98	9.463.010,58	10.748.862,48
Pelalawan	3.184.643,39	3.967.198,28	4.459.648,71	4.896.862,80	5.592.876,21
Siak	6.757.441,69	9.195.183,32	10.446.333,85	12.330.747,26	14.742.445,08
Bengkalis	8.367.816,28	10.549.277,36	12.436.818,70	13.753.043,96	15.713.859,89
Rokan Hilir	3.265.262,37	4.283.909,36	4.736.256,51	5.081.012,65	5.675.618,56
Kep.Meranti	1.833.017,15	2.266.952,26	2.611.771,24	2.930.301,25	3.267.375,79
Dumai	5.513.594,64	6.354.216,80	7.102.991,98	7.643.811,61	7.788.233,85
Riau Pesisir	34.585.404,21	43.920.040,36	50.124.089,98	56.098.790,12	63.529.271,86

Sumber : BPS, 2016

Sedangkan apabila nilai investasi di wilayah Riau Pesisir dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2010 rata-rata setiap tahunnya investasi tumbuh sebesar 8,37%. Sehingga investasi di wilayah Riau Pesisir mampu meningkat dari Rp. 34.585,40 milyar pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 47.692,42 milyar pada tahun 2014. Wilayah kabupaten/kota di Riau Pesisir yang memiliki berkontribusi cukup besar terhadap investasi di

wilayah Riau Pesisir adalah Kabupaten Bengkalis dengan nilai PMTDB pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.367,82 milyar dan meningkat menjadi Rp. 11.958,35 milyar pada tahun 2014. Kontribusi terbesar kedua terbesar adalah Kabupaten Siak dengan nilai PMTDB pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.757,44 milyar menjadi sebesar Rp. 9.876,78 milyar pada tahun 2014. Rokan Hilir merupakan daerah dengan kontribusi PMTDB terendah, dimana tahun 2014 sebesar Rp. 4.434,76 milyar.

Tabel 2 : Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Riau Pesisir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
Indragiri Hilir	5.663.628,70	6.543.396,14	7.045.501,47	7.415.485,10	7.794.140,84
Pelalawan	3.184.643,39	3.801.553,00	4.151.338,43	4.389.543,67	4.657.444,81
Siak	6.757.441,69	7.884.936,61	8.711.796,83	9.431.013,19	9.876.781,12
Bengkalis	8.367.816,28	9.989.913,27	10.939.235,25	11.410.642,00	11.958.345,81
Rokan Hilir	3.265.262,37	3.928.964,98	4.215.515,02	4.346.109,53	4.434.761,79
Kep. Meranti	1.833.017,15	2.118.714,80	2.308.386,78	2.441.656,92	2.507.580,11
Dumai	5.513.594,64	6.109.453,74	6.594.137,60	6.958.184,24	6.463.363,34
Riau Pesisir	34.585.404,21	40.376.932,55	43.965.911,37	46.392.634,65	47.692.417,83

Sumber : BPS, 2016

Struktur investasi di wilayah Riau Pesisir menurut sektor ekonomi berdasarkan harga berlaku selama periode 2011-2014 sumber utama masih didominasi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pada

tahun 2011 diperkirakan nilai investasi pada sektor pertambangan sebesar Rp. 18.689,99 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 32.609,96 milyar pada tahun 2014 atau tumbuh rata-rata setiap tahun sebesar 14,93%.

Tabel 3 : Perkiraan Investasi Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2014 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.543.973	9.531.489	10.120.018	11.561.843
B	Pertambangan dan Penggalian	18.689.988	24.799.747	29.270.652	32.609.963
C	Industri Pengolahan	10.772.488	10.680.279	11.080.442	12.758.817
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.868	7.217	7.004	7.037
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.453	4.073	4.293	4.542
F	Konstruksi	1.213.379	1.350.163	1.450.683	1.716.154
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.248.099	2.293.452	2.512.155	2.901.130
H	Transportasi dan Pergudangan	192.810	194.039	220.706	263.910
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76.596	78.221	88.389	115.082
J	Informasi dan Komunikasi	124.889	126.478	146.345	181.474
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166.398	169.864	219.778	276.617
L	Real Estate	149.824	154.484	172.825	199.482
M.N	Jasa Perusahaan	938	955	1.119	1.341
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	462.927	457.461	510.997	589.199
P	Jasa Pendidikan	128.688	133.285	140.645	161.217
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.700	37.641	42.351	49.649
R.S.T.U	Jasa lainnya	99.023	105.244	110.388	131.816
PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTDB)		43.920.040,36	50.124.089,98	56.098.790,12	63.529.271,86

Sumber : Data Olahan

Walaupun dilihat dari struktur investasi sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor ekonomi dengan nilai investasi terbesar namun pertumbuhannya mulai melambat. Sektor ekonomi yang mengalami

pertumbuhan investasi cukup tinggi di wilayah Riau Pesisir adalah sektor informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebesar 13,60%, diikuti sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13,32%.

Tabel 4 : Perkiraan Investasi Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2014 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.774.043,76	9.545.034,81	10.303.837,74	10.968.365,46
B	Pertambangan dan Penggalian	17.182.232,99	18.456.334,22	18.574.551,78	17.641.067,20
C	Industri Pengolahan	9.903.451,89	10.837.005,79	11.775.624,54	12.791.387,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.232,86	8.144,59	9.053,54	9.784,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.093,87	4.421,14	4.641,98	4.901,52
F	Konstruksi	1.115.493,99	1.277.096,04	1.397.136,12	1.512.441,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.066.740,56	2.334.955,51	2.626.476,13	2.871.209,61
H	Transportasi dan Pergudangan	177.256,06	200.213,98	230.100,36	254.813,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.417,27	79.852,00	91.105,63	106.817,70
J	Informasi dan Komunikasi	114.813,84	137.606,40	163.068,94	191.215,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152.974,24	173.857,20	216.329,50	252.252,14
L	Real Estate	137.737,61	154.280,75	172.704,00	189.018,67
M.N	Jasa Perusahaan	861,98	986,26	1.121,66	1.249,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	425.582,09	483.883,13	529.195,77	572.101,78
P	Jasa Pendidikan	118.306,44	129.733,58	140.493,10	151.109,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.658,89	38.480,50	42.966,98	47.517,35
R.S.T.U	Jasa lainnya	91.034,22	104.025,45	114.226,88	127.164,57
PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO (PMTDB)		40.376.932,55	43.965.911,37	46.392.634,65	47.692.417,83

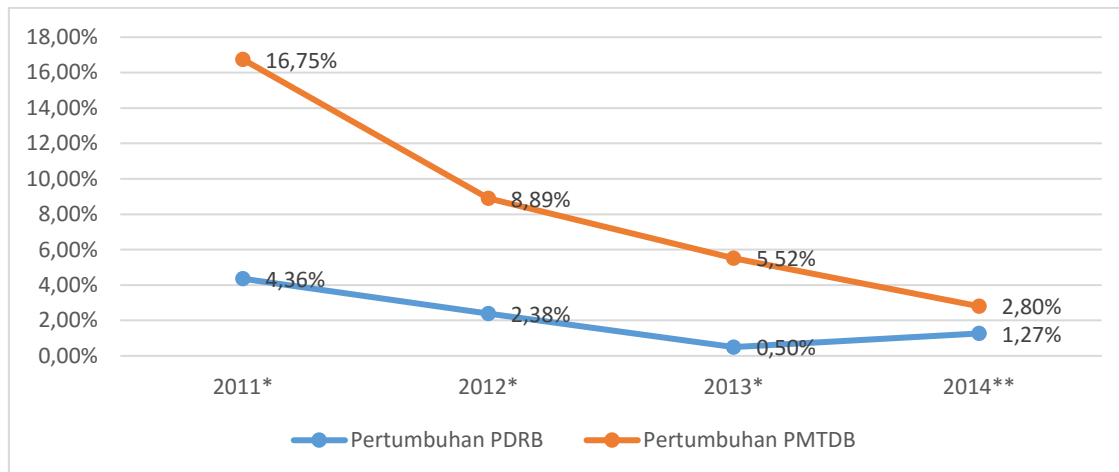
Sumber : Data Olahan

B. Hubungan Investasi dan Pendapatan di Wilayah Riau Pesisir

Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya inefficiency dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negative atau nilai relative besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relative kecil. (BPS

dan Bappeda DIY, 2014).

Variabel ekonomi (GDP, *Growth*, *Wage*, dan Ekspor) mempunyai hubungan positif dengan FDI, sedangkan variabel non ekonomi yaitu stabilitas politik mempunyai hubungan negatif. (Sarwedi, 2002). Pada tahun 2010 investasi di wilayah Riau Pesisir tumbuh sebesar 4,36% dan ekonomi tumbuh sebesar 16,75%. Tahun 2014 kinerja investasi turun menjadi 1,27% dan ekonomi hanya tumbuh sebesar 2,80%.



Gambar 3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Investasi (PMTDB) di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2011-2014

Indikator yang dapat mencerminkan kinerja dari investasi diantaranya adalah *Capital Output Ratio* (COR). Rata-rata selama periode 2010-2014 angka COR di wilayah Riau Pesisir sebesar 0,136. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap pendapatan sebesar Rp. 1 dibutuhkan investasi sebesar Rp. 0,136. Kebutuhan investasi untuk setiap pendapatan dilihat menurut daerah di wilayah Riau Pesisir yang tertinggi

adalah Kota Dumai dengan nilai COR sebesar 0,345 dan terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,080. Trend angka COR di wilayah Riau Pesisir selama periode 2010-2014 terus meningkat dari 0,135 di tahun 2010 meningkat menjadi 0,142 di tahun 2014. Ini berarti setiap rupiah investasi yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan yang cenderung lebih rendah.

Tabel 5 : Capital Output Ratio (COR) di Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**	Rata-Rata
Indragiri Hilir	0,202	0,215	0,221	0,225	0,225	0,219
Pelalawan	0,134	0,147	0,154	0,152	0,148	0,148
Siak	0,129	0,136	0,132	0,151	0,173	0,146
Bengkalis	0,098	0,086	0,088	0,090	0,097	0,091
Rokan Hilir	0,082	0,086	0,080	0,078	0,076	0,080
Kep. Meranti	0,211	0,221	0,221	0,217	0,202	0,213
Dumai	0,315	0,345	0,375	0,361	0,330	0,345
Riau Pesisir	0,135	0,133	0,133	0,137	0,142	0,136

Sumber : Data Olahan Cat : I = PMTDB

COR di wilayah Riau Pesisir berdasarkan harga konstan 2010 selama periode 2010-2014 rata-rata sebesar 0,158. Pada tahun 2010 angka COR sebesar 0,135 dan terus meningkat

sampai dengan tahun 2014 menjadi sebesar 0,172. Angka COR wilayah tertinggi di wilayah Riau Pesisir adalah Kota Dumai sebesar 0,335 dan terendah Rokan Hilir sebesar 0,097.

Tabel 6 : *Capital Output Ratio (COR)* di Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**	Rata-Rata
Indragiri Hilir	0,202	0,218	0,217	0,213	0,210	0,212
Pelalawan	0,134	0,151	0,160	0,160	0,160	0,154
Siak	0,129	0,151	0,164	0,182	0,192	0,163
Bengkalis	0,098	0,109	0,120	0,129	0,140	0,119
Rokan Hilir	0,082	0,098	0,102	0,102	0,100	0,097
Kep. Meranti	0,211	0,228	0,233	0,237	0,232	0,229
Dumai	0,315	0,335	0,349	0,355	0,318	0,335
Riau Pesisir	0,135	0,151	0,161	0,169	0,172	0,158

Sumber : Data Olahan Cat : I = PMTDB

Selama periode 2010-2014 di wilayah Riau Pesisir rata-rata untuk meningkatkan tambahan pendapatan sebesar Rp. 1 dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp. 1,289. Daerah dengan angka ICOR tertinggi adalah Kota Dumai sebesar 5,640 dan Rokan Hilir sebesar 0,663. Angka ICOR di wilayah Riau Pesisir berdasarkan harga

berlaku secara umum setiap tahunnya cenderung mengalami fluktuatif. Secara tersirat kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian di wilayah Riau Pesisir lebih bersifat terbuka sehingga harga berbagai komoditi dari kegiatan investasi di wilayah ini lebih ditentukan oleh faktor eksternal.

Tabel 7 : *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* di Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2014

Kabupaten/Kota	2011*	2012*	2013*	2014**	Rata-Rata
Indragiri Hilir	0,956	1,966	1,924	1,626	2,098
Pelalawan	1,020	1,896	1,419	0,858	1,571
Siak	0,450	0,776	4,676	3,157	1,619
Bengkalis	0,221	0,571	1,101	1,407	0,786
Rokan Hilir	0,333	0,466	0,749	0,537	0,663
Kep. Meranti	1,156	1,449	1,561	1,088	1,717
Dumai	6,053	11,554	3,232	3,131	5,640
Riau Pesisir	0,466	0,925	1,607	1,409	1,289

Sumber : Data Olahan Cat : I = PMTDB

Perkembangan ICOR secara riil dapat dilihat dari ICOR atas dasar harga konstan. Selama periode 2011-2014 rata-rata ICOR di wilayah Riau Pesisir sebesar 9,532 dengan angka ICOR setiap tahunnya yang cenderung fluktuatif. Bahkan beberapa daerah penghasil migas di wilayah Riau Pesisir seperti Kabupaten Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir angka ICORnya mengalami negatif. Kondisi ini terjadi karena

investasi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan harga minyak dunia dan menurunnya produksi minyak daerah penghasil minyak bumi di wilayah Riau Pesisir mengakibatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas mengalami penurunan sehingga menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 8 : Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Wilayah Riau Pesisir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2011*	2012*	2013*	2014**	Rata-Rata
Indragiri Hilir	2,820	2,752	3,032	3,083	3,781
Pelalawan	2,335	5,004	2,888	2,638	3,863
Siak	(24,714)	7,302	(6,402)	(25,762)	(46,349)
Bengkalis	1,249	(16,587)	(3,437)	(3,696)	(303,684)
Rokan Hilir	(942,919)	2,696	4,082	2,553	4,820
Kep. Meranti	3,067	3,407	5,758	5,089	5,337
Dumai	7,383	9,152	9,365	10,050	11,256
Riau Pesisir	3,105	6,346	32,443	13,291	9,532

Sumber : Data Olahan Cat : I = PMTDB

C. Kebutuhan Investasi di Wilayah Riau Pesisir

Investasi juga identik dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara/wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). Disebut PMTB karena di dalamnya tidak termasuk perubahan stok (*inventory*). (BPS dan Bappeda Situbondo, 2012). Selanjutnya menurut Salim (2010) investasi merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Namun untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Kegiatan investasi menurut Sasana (2008), berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kehadirannya mampu berperan sebagai motor penggerak dan sekaligus menjadi pendorong percepatan pembangunan secara luas.

Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Riau Pesisir atas dasar harga konstan 2010 dengan migas selama periode 2016-2020 diperkirakan rata-rata setiap tahunnya tumbuh sebesar 2,87%. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dengan migas wilayah Riau Pesisir pada tahun 2016 sebesar Rp. 295.825,84 milyar dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 331.331,85 milyar. Diluar Kabupaten Bengkalis dan Siak diperkirakan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di wilayah Riau Pesisir masih positif.

Tabel 9 : Perkiraan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Indragiri Hilir	45.055.690,38	48.996.756,77	52.937.823,17	56.878.889,56	60.819.955,95
Pelalawan	33.040.532,54	35.049.607,21	37.058.681,88	39.067.756,55	41.076.831,22
Siak	50.975.890,88	50.713.881,27	50.451.871,65	50.189.862,04	49.927.852,42
Bengkalis	85.026.134,13	84.975.693,60	84.925.253,07	84.874.812,54	84.824.372,02
Rokan Hilir	46.958.045,44	48.360.479,53	49.762.913,62	51.165.347,70	52.567.781,79
Kepulauan Meranti	12.446.973,38	13.275.214,08	14.103.454,78	14.931.695,49	15.759.936,19
Dumai	22.322.577,74	23.330.714,14	24.338.850,54	25.346.986,94	26.355.123,35
Riau Pesisir	295.825.844,49	304.702.346,60	313.578.848,71	322.455.350,83	331.331.852,94

Sumber : Data olahan

Perubahan nilai pendapatan yang nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga (Prishardoyo, 2008). Selanjutnya agar terjadi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan menurut Soesilowati (2008) berbagai perubahan dalam pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan, karena jika suatu kenaikan pendapatan nyata yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka akan terjadi kemunduran ekonomi. Menurut Shandra (2012), apabila investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun naik dan sebaliknya. Lebih lanjut Prasetyo (2008), dampak dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah diperoleh hasil pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi

kesejahteraan seluruh masyarakat, adanya transformasi dari masyarakat yang terbelenggu dalam keterbelakangan (*vicious circle*) menjadi mampu menuju masyarakat yang “lebih maju”.

Dengan asumsi inflasi yang terjadi selama periode 2016-2020 rata-rata sebesar 12,96%, maka diperkirakan besarnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp. 332.210,67 milyar dan tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 370.565,44 milyar. Pada tahun 2020 diperkirakan Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada wilayah Riau Pesisir dengan perkiraan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 99.729,05 milyar yang diikuti Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp. 60.146,70 milyar.

Tabel 10 : Perkiraan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Indragiri Hilir	48.203.133,96	52.419.510,40	56.635.886,83	60.852.263,27	65.068.639,70
Pelalawan	35.427.447,39	37.581.661,68	39.735.875,96	41.890.090,25	44.044.304,53
Siak	57.823.565,30	57.526.359,51	57.229.153,72	56.931.947,93	56.634.742,13
Bengkalis	99.966.266,97	99.906.963,42	99.847.659,88	99.788.356,33	99.729.052,79
Rokan Hilir	53.728.180,76	55.332.809,56	56.937.438,36	58.542.067,17	60.146.695,97
Kepulauan Meranti	13.853.428,07	14.775.256,42	15.697.084,77	16.618.913,13	17.540.741,48
Dumai	23.208.649,23	24.256.802,55	25.304.955,88	26.353.109,20	27.401.262,53
Riau Pesisir	332.210.671,67	341.799.363,54	351.388.055,40	360.976.747,27	370.565.439,13

Sumber : Data olahan

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, dan perusahaan semakin banyak. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masy-

arakat, oleh karenanya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata, (Barika, 2012). Menurut Sebayang (2008), metode keuangan yang dapat digunakan mempengaruhi variabel ekonomi dan politik adalah keseimbangan politik, keseimbangan pasar, dan distribusi pendapatan.

Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan besarnya PDRB atas dasar harga konstan yang akan diwujudkan dalam perekonomian di Wilayah Riau Pesisir pada tahun 2016-2020 maka dapat diperkirakan besarnya investasi yang dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan besarnya angka COR pada daerah di wilayah Riau Pesisir selama periode 2010-2014 maka dapat ditentukan besarnya perkiraan investasi yang dibutuhkan pada daerah-daerah di wilayah Riau Pesisir untuk periode

2016-2020. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya total investasi yang dibutuhkan selama lima tahun yaitu Rp. 257.431,24 milyar dengan rata-rata pertumbuhan investasi setiap tahunnya sebesar 2,87%. Dilihat menurut kabupaten/ kota yang terdapat di wilayah Riau Pesisir Investasi terbesar berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir dan terendah diperkirakan berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 11 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Indragiri Hilir	9.554.541	10.390.287	11.226.032	12.061.777	12.897.523
Pelalawan	5.080.821	5.389.767	5.698.714	6.007.660	6.316.606
Siak	8.327.202	8.284.401	8.241.600	8.198.799	8.155.999
Bengkalis	10.130.314	10.124.305	10.118.295	10.112.285	10.106.276
Rokan Hilir	4.559.383	4.695.552	4.831.721	4.967.890	5.104.059
Kepulauan Meranti	2.848.024	3.037.536	3.227.048	3.416.560	3.606.072
Dumai	7.468.270	7.805.553	8.142.837	8.480.120	8.817.403
Riau Pesisir	47.968.556	49.727.402	51.486.247	53.245.093	55.003.938

Sumber : Data olahan

Dengan asumsi indeks implisit investasi setiap wilayah yaitu Indragiri Hilir sebesar 9,06%, Pelalawan sebesar 5,15%, Siak sebesar 11,58%, Bengkalis sebesar 7,73%, Rokan Hilir sebesar 6,87%, Kepulauan Meranti sebesar 7,40%, dan Kota Dumai sebesar 4,97%. Dapat ditentukan besarnya kebutuhan

investasi ditahun 2016 sebesar Rp. 59.278,48 milyar dan tahun 2020 sebesar Rp. 59.278,48 milyar. Dengan demikian, total kebutuhan investasi atas dasar harga berlaku di wilayah Riau Pesisir periode 2016-2020 diperkirakan sebesar Rp. 277.540,47 milyar.

Tabel 12 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Atas Dasar Harga Berlaku di Wilayah Riau Pesisir Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Indragiri Hilir	10.420.441	11.331.928	12.243.414	13.154.900	14.066.387
Pelalawan	5.342.419	5.667.272	5.992.125	6.316.978	6.641.831
Siak	9.291.527	9.243.769	9.196.012	9.148.255	9.100.498
Bengkalis	10.912.990	10.906.516	10.900.042	10.893.568	10.887.094
Rokan Hilir	4.872.513	5.018.034	5.163.555	5.309.076	5.454.597
Kepulauan Meranti	3.058.720	3.262.252	3.465.784	3.669.316	3.872.848
Dumai	7.839.099	8.193.129	8.547.160	8.901.191	9.255.222
Riau Pesisir	51.737.709	53.622.901	55.508.093	57.393.285	59.278.477

Sumber : Data olahan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Investasi sektor pertambangan dan penggalan masih memegang peranan yang cukup tinggi dalam investasi di wilayah Riau Pesisir, namun seiring penurunan harga minyak dunia investasi disektor ini juga mulai melambat.
2. Angka *Capital Output Ratio* (COR) selama periode 2010-2014 atas dasar harga berlaku di wilayah Riau Pesisir rata-rata sebesar 0,136 dan berdasarkan harga konstan 2010 sebesar 0,158. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) di wilayah Riau Pesisir atas dasar harga berlaku selama periode 2010-2014 sebesar 1,289 dan berdasarkan harga konstan ICOR di wilayah Riau Pesisir sebesar 9,532.
3. Kebutuhan total investasi selama periode 2016-2020 di wilayah Riau Pesisir atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp. 257.431,24 milyar atau berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 277.540,47 milyar.

B. Saran

1. Peranan sektor pertambangan yang terus melambat karena dipengaruhi menurunnya harga

minyak dunia dan menurunnya produksi minyak harus segera diantisipasi dengan meningkatkan dan mengembangkan kegiatan investasi diluar sektor pertambangan dan penggalan.

2. Angka ICOR wilayah Riau Pesisir yang relatif masih tinggi (9,532) harus terus diupayakan untuk diturunkan pada tingkat yang lebih efisien (3 – 4) melalui peningkatan kinerja pelayanan investasi, memberikan insentif investasi, pembenahan regulasi, kebijakan yang dapat menghambat berkembangnya kegiatan investasi di wilayah Riau Pesisir.
3. Sumber pendanaan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah cenderung terbatas. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi di wilayah Riau Pesisir selama periode 2016-2020 peran investasi swasta (PMDN dan PMDA), dan masyarakat menjadi sangat penting untuk terus digali, didorong dan digerakkan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Riau Pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Barika, 2012. *Analysis Of Regional Disparities Regencies/Cities In The Province Of Bengkulu Year 2005 – 2009*. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan volume : 04. No. 03, Januari - Juni 2012 ISSN: 1979-7338.
- BPS dan Bappeda DIY, 2014. Analisis ICOR Sektorial Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013.
- BPS dan Bappeda Situbondo, 2012. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Tahun 2011*.
- BPS Provinsi Riau, 2015. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2010.
- Prasetyo, Eko P., 2008. The Quality Of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 18-31.
- Prishardoyo, Bambang, 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005 . Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 1-8.
- Salim, Agus, 2010. Pengembangan Investasi Daerah: Agenda Pemerintah Daerah, diakses dari <http://agusjero.blogspot.com/2010/09/pengembangan-investasi-daerah-agenda.html>
- Sasana, Hadi, 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta Di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 32-40.
- Sebayang, Karolina Lesta, 2008. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai *Political Proses* Dengan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 63-69.
- Shandra, Yosi, 2012. Konsumsi Dan Investasi Serta Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi. Volume 1, Nomor 1, April 2012
- Soesilowati, Etty, 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Wilayah Pinggiran dan Kebijakan Yang Ditempuhnya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), Volume 1, Nomor 1, September 2008. Hlm. 9-17.
- Taryono dan Ekwarso, H., 2012. Analisis Pengeluaran Dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2008 dan 2009. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II No. 5, Maret 2012.
- Taryono dan Ekwarso, H., 2013. Analisis Ketersediaan Infrastruktur Di Pulau Sumatera. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun IV No.10, November 2013 : 101 – 118.
- Taryono, 2012. Analisis Belanja Daerah Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten/Kota Penghasil Migas Dan Bukan Penghasil Di Provinsi Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun III No. 7, November 2012 : 52 -70.
- Sarwedi, 2002. Investasi Asing Langsung Di Indonesia dan Faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 17 - 35